

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, Erman Muchtar, Sofyan Hadi. (2021). Political Will *Walikota Dalam Memutus Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru*. *Jurnal ilmu ilmiah*
- Amir, M. (2017). *Manajemen Konflik Dalam Pembangunan Infrastruktur*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ardiyanti, J.M. & Ummi, M. (2024). *Penerapan Teori Hukum dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Sengketa Lahan di Lampung Tengah)*.  
<https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/5702>
- Arif. (2012). *Peran dan fungsi pemerintah*
- Bakker, S. (2015). *Resolusi Konflik pada Proyek-Proyek Infrastruktur*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Brinkerhoff, D. W. (2010). *Unpacking Political Will: Concepts, Definitions, and Indicators*. Washington D.C.: U.S. Agency for International Development (USAID).
- Effendi, S. (2019). *Kebijakan Publik dan Political Will*. Jakarta: Pustaka Raja.
- Ervan Wirawan. (2018). *Konflik Pembebasan Tanah Pada Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Mekanisme Ganti Rugi di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang)*. Jurnal politik muda  
<https://repository.unair.ac.id/68061/>
- Ginting, H. (2020). *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. Medan: Unimed Press.
- Gunanegara. (2008). *Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Tatanusa.
- Frederickson, H. George. (2005). *Public Administration and Social Equity*.
- Harry Kurniadi Atmaja. (2015). *Pengaruh peningkatan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga*. Jurnal ekonomi dan keuangan
- Ilham Gemiharto. (2016). *Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka*. Jurnal Agrerasi:aksi revormasi government dalam demokrasi  
<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi/article/view/192>

Keputusan Gubernur Nomor 1730 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung-cilincing.

Kerzner, Harold. (2009). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. Hoboken: John Wiley & Sons.

Maria S. W. Sumardjono. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2008

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad mulyadi. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Jakarta Utara*. Jurnal masalah-masalah sosial <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1262>

Peraturan Kepala BPN Nomor. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016

### **Peraturan Menteri ATR/BPN No. 19 Tahun 2021**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Anggaran Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 13/PMK.02/2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang teknis pelaksanaan pengadaan tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tahapan pelaksanaan pengadaan tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 1

Riyanto, B. (2016). *Sosialisasi dan Partisipasi dalam Proyek Infrastruktur Publik*. Surabaya: Airlangga University Press.

Rubaie, Achmad. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Salim, H. (2017). *Administrasi Pertanahan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sari, Dewi Wulan. (2009). *Peran Individu dalam Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. (2009). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutedi, Adrian. (2007). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thoha, Miftha. (2005). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Wahyudi, T. (2020). *Political Will dan Penyelesaian Sengketa Lahan pada Pembangunan Infrastruktur*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, A. (2018). *Tantangan Administrasi Pertanahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Widodo.(2010). Analisis Kebijakan Publik.Jakarta: PT Bumi Aksara
- Zainuddin, A. (2019). *Hukum Tanah Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*. Surabaya: Pustaka Sinar Harapan.
- Zulkarnain, H. (2021). *Penyelesaian Konflik Sosial dalam Proyek Infrastruktur*. Jakarta: Elex Media Komputindo.